

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG

Tepi Peirisal

Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang
teypei@gmail.com / tepipeirisal@unsub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini didasarkan masalah penelitian evaluasi implementasi kebijakan penanggulangan banjir di kabupaten Bandung belum efektif. Fokus dalam penelitian ini, yaitu pada implementasi kebijakan yang didasarkan pada kriteria evaluasi *legality, political acceptability dan robustness under conditions of administrative implementation, and improvability* yang belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif serta pengolahan data dengan metode analisis deskriptif, dengan maksud menjawab pertanyaan penelitian yakni Apa yang menyebabkan evaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung belum efektif. Dengan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder melalui observasi, analisis dokumentasi, wawancara mendalam dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi melalui cek, ricek dan konfirmasi antara hasil observasi, analisis dokumentasi dengan hasil wawancara.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh evaluator belum menyentuh sisi legalitas (*legality*) yang membahas mengenai tumpang tindih aturan dalam persepektif otonomi daerah. Dari kriteria penerimaan politis (*political acceptability*) belum dapat melihat bagaimana peran aktor-aktor yang terlibat dalam mengakomodir anggaran penanggulangan bencana banjir. Selanjutnya pada kriteria *robustness under conditions of administrative implementation, and improvability* merupakan penjabaran dari laporan kinerja tanpa mengungkap apakah hasil dan manfaat kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kawasan bencana banjir. Temuan dalam penelitian ini, yaitu keberhasilan evaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung harus didukung oleh peran masyarakat, kelembagaan, kapabilitas organisasi agar mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang mencakup akses legal dan penerimaan secara politis

Kata Kunci: Evaluasi Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana Banjir.

Abstract

The evaluation of flood mitigation management policy implementation in Bandung regency has not been effective. Focus in scientific research of the implementation is based on legal criteria, legality, political acceptability dan robustness under conditions of administrative implementation, and improvability that has not been fully effective in tackling the floods in Bandung regency.

This study uses qualitative research as well as data processing with descriptive analysis method, in order to answer the research question What causes the evaluation of flood mitigation management policy implementation in Bandung regency has not been effective. With source data obtained from a source of primary data and secondary data through observation, analysis documentation, in-depth interviews and validity of the data was done by using triangulation by check, re-check and confirm the observation, documentation analysis with the results of the interview.

The results of the study reveal that the evaluation made by the evaluators have not touched the side of legality that discussed the overlapping rules in the perspective of regional

autonomy. From the criteria political acceptability has not been able to see how the role of the actors involved in the budget to accommodate the flood disaster management. Furthermore, the criteria of robustness under conditions of administrative implementation, and improvability the elaboration of a performance report without revealing whether the results and benefits of the activity was in accordance with the needs of the people in the affected areas of flooding.

The findings in this study, namely the successful the evaluation of flood mitigation management policy implementation in Bandung regency should be supported by the role of the public, institutional, organizational capability to be able to produce policy recommendations that include access to legal and political acceptance of flooding.

Keyword: The Implementation Evaluation, Flood Mitigation Management Policy.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Banjir merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi hampir seluruh kota di Indonesia, wilayah yang memiliki 7983 sungai induk (hasil penetapan wilayah sungai melalui Keputusan Presiden No.12 tahun 2012). Selain dilalui oleh 600 sungai yang rawan menimbulkan banjir, terdapat paradok antara penduduk dan air, yaitu pertumbuhan penduduk yang meningkat mengakibatkan peningkatan ruang yang terbangun, namun pengurangan ketersediaan air karena wadah air berkurang sekaligus meningkatkan potensi banjir (Kodoatie, 2013:2).

Untuk menanggulangi bencana, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mempertimbangkan berbagai resiko bencana dalam setiap proses pembangunan. Undang-undang ini lahir dari *issue* strategis yang muncul akibat lemahnya aturan penanganan bencana sebelumnya. Secara substansi terjadi perubahan paradigma dalam penanganan bencana sebelumnya yang menfokuskan pada repon tanggap darurat menjadi pengurangan resiko bencana (*disaster risk reduction*).

Secara Kelembagaan, organisasi penanggulangan bencana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional

Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, dan ditindaklanjuti dengan PP No. 83 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas-PB).Selanjutnya pembentukan Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kehadiran undang-undang penanggulangan bencana mempunyai peranan penting bagi masyarakat karena memberikan perlindungan dan rasa aman dari ancaman bencana khususnya di Kabupaten/ Kota. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam undang-undang tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. Pengurangan risiko bencana (PRB) dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Dalam melaksanakan kewajiban serta menjalankan fungsinya sebagai *mediating structure* (struktur perantara)

yang secara operasional menterjemahkan kebijakan makro ke kebijakan mikro sesuai dengan kebutuhan di daerah Pemerintah Kabupaten Bandung membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Bandung melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

Kelembagaan BPBD memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana, mengingat upaya pengurangan resiko bencana memerlukan koordinasi antar lembaga pemerintah, kesiapan pemerintah pusat dan daerah yang sekaligus dibekali dengan pengetahuan mengenai kebencanaan. Program-program maupun kegiatan yang telah dirancang Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Bandung dalam menanggulangi banjir hingga saat ini tercatat sebanyak 12 program kegiatan yang masing-masing memiliki tujuan untuk peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, menyediakan Sistem Informasi Geografis kebencanaan di Wilayah Kabupaten Bandung, perencanaan pengembangan ekonomi di daerah dalam rangka pemulihan sektor ekonomi bagi masyarakat korban bencana, penyusunan peta rawan bencana wilayah Kabupaten Bandung, pengurangan dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana, melatih personil kebencanaan serta penyebarluasan informasi kebencanaan, pengadaan perahu untuk korban banjir, sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana dan penyusunan rumusan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berkaitan dengan pentingnya suatu evaluasi dalam penanggulangan bencana banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung telah

membentuk tim untuk mengevaluasi bencana banjir di Kabupaten Bandung.

Sebagai landasan hukum, kegiatan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Evaluasi yang dilakukan ditujukan untuk melihat kebijakan penanggulangan bencana dari beberapa aspek yaitu dari berbagai peraturan yang secara khusus mengatur tentang bencana itu sendiri, kebijakan lain yang memiliki kaitan erat dengan penanggulangan bencana, sistem kelembagaan dalam penanggulangan bencana serta kebijakan yang terkait dengan alokasi anggaran dibidang kebencanaan.

1.2 Rumusan masalah

Apa yang menyebabkan implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung belum efektif?

KAJIAN PUSTAKA

Paradigma baru dalam penanggulangan bencana membawa perubahan dalam penanganan bencana alam, yang sebelumnya lebih memfokuskan pada penanggulangan kedaruratan (*emergency response*) pada saat bencana terjadi, menjadi upaya pengurangan keseluruhan resiko bencana yang meliputi kegiatan pencegahan dan mitigasi (Pujiono, Kumorotomo, 2007)

Peran pemerintah dalam mengatasi bencana merupakan tanggungjawab dan pemenuhan hak dasar masyarakat yang diatur oleh konstitusi. Pada sisi lain penanggulangan bencana sangat kompleks sehingga memerlukan peran serta

masyarakat karena keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Bencana menyangkut isu ; siapa saja korbanya, berapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan, siapa yang harus bertanggungjawab untuk mengatasi persoalan, bagaimana mekanisme organisasi penanggulangan bencana, siapa dan bagaimana melakukan monitoring kegiatan (Pramusinto, 2009 : 129). Dengan demikian penanggulangan bencana merupakan persoalan *public administration* dan *public policy*. Mengutip pendapat Dimock and Dimock dalam Ibrahim (2008: 15) “*Public administration is the produce of good and service designed to serve the needs of citizen – costumers.*”

Huiterma et.all (2011: 183) membandingkan pemikiran Dunn (2000), Vedung (2005); Wollmann (2003); Kraft and Furlong (2010) dan menyimpulkan menjadi suatu kriteria dalam evaluasi. Kriteria tersebut meliputi; *goal attainment and efectiveness, cost-efectiveness, efficiency, fairnes, legitimacy, coordination with other policy, and legal acceptability.* Dengan demikian tujuan evaluasi kebijakan seperti dikemukakan oleh Huiterma et.all (2011: 183) “*therefore less to support the state and more to offer insight into the discourses and frames that are used by various actors to make sense of the world around them, including the nature problem and performance of policies*”

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bardach di atas dapat diartikan, yakni tidak semua kriteria dapat dipergunakan dalam mengevaluasi implementasi kebijakan. Terdapat bagian yang benar-benar utuh secara praktis dan ada bagian yang merupakan analisis secara keseluruhan. Penggunaan criteria ini disesuaikan dengan kondisi yang terjadi senyatannya sebagaimana proses berjalannya adopsi kebijakan dan implementasi kebijakan. Yang utama adalah legalitas, penerimaan secara politis, daya dukung administrasi dan kemampuan ke arah peningkatan maupun perbaikan (*improvability*) kebijakan.

Perbedaan menentukan kriteria terletak pada nilai yang akan di maksimalkan, hal apa saja yang harus diminimalkan karena sudah terpuaskan atau secara keseluruhan prioritas apa saja yang perlu dikurangi karena sudah lebih baik, namun menurut Bardach (2012:41) kriteria seperti *legaly, political acceptability, robustness under conditions of administrative implementation, and improvability*

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, mengingat tujuan penelitian ini untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang diperlukan agar evaluasi implementasi kebijakan berjalan efektif, yang merupakan bagian penting dari sistem dan proses kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung. Hal tersebut sesuai dengan penggunaan metode kualitatif, ketika peneliti bermaksud untuk mengidentifikasi gejala dan pengaruh yang tidak terantisipasi (*unanticipated phenomena*) sebelumnya (Maxwell, 1996:19).

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu memahami dan menemukan fakta mengapa evaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir Kabupaten Bandung belum efektif, menggambarannya secara akurat sifat dari beberapa fenomema kelompok atau individu hasil dari temuan. Pendekatan ini diarahkan pada *setting* dan individu secara utuh dan menekankan pemahaman tingkah laku menurut pola berfikir dan bertindak subjek kajian (Garna, 2001: 33).

HASIL PENELITIAN

1. Legality

Kebijakan penangulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penangulangan bencana pada tanggal 24 April tahun 2007. Perjalanan yang cukup panjang sampai akhirnya kebijakan ini lahir, mengingat lemah dan lambannya penangulangan

bencana yang selama ini terjadi, bencana dianggap suatu kejadian yang luar biasa dan dianggap hukuman dari Tuhan dan manusia hanya dapat menerima begitu saja. Pada penanggulangan bencana sebelumnya kegiatan lebih banyak terfokus pada respon darurat ketika bencana terjadi, tidak ada suatu siklus penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat tidak ada bencana maupun sesudah bencana terjadi melalui cetak biru yang sudah dibuat sebelumnya.

Pada kenyataan di lapangan peran BPBD dalam mengatasi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung memang dilandasi dasar hukum yang kuat, yaitu berlandaskan pada PERDA No 11 tahun 2010 tentang Pembentukan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No 53 tahun 2010 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bandung. Dengan demikian, begitu jelas dilihat dari kriteria legalitas.

Menurut Bardach (2012:41), kriteria *legality* merupakan suatu tinjauan terhadap suatu kebijakan yang didasarkan tidak adanya pertentangan dengan peraturan yang berlaku dan legal secara hukum. Pandangan dari Bardach tersebut, diperkuat oleh pernyataan Jones (1994:198), yakni “diawali melalui standar mengenai tatacara (*means*) legitimasi suatu kebijakan dimulai melalui suatu sistem politik. Bentuk legitimasi tersebut melalui pemberian wewenang (*authorizes*) kepada proses-proses politik dasar, yang meliputi juga proses yang dirancang untuk mengesahkan proposal-proposal khusus mengenai pemecahan masalah publik (*publics problems*). Selain itu, legitimasi meliputi proses-proses khusus melalui program-program yang disahkan pemerintah. Yang pertama mengacu pada pengesahan (legitimasi) yang kedua pada persetujuan (*approval*)

Faktanya, yaitu diketahui dari hasil kajian yang dilakukan oleh Bappenas dan MAP UGM tahun 2009, mengungkap

bahwa Evaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana akan menemui kendala berkaitan dengan keberadaan UU No.32 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan dalam kajian tersebut bahwa konsep otonomi daerah mengandung beberapa prinsip seperti pembagian kewenangan yang jelas antar tingkatan pemerintahan dengan menekankan prinsip bahwa selama pemerintah paling bawah bisa menjalankan pekerjaan maka kewenangan pemerintah pusat harus dibatasi. Selain hal tersebut perihal Undang-Undang di atas, terdapat pula kaitannya dengan pendistribusian sumber-sumber pembiayaan untuk melaksanakan kewenangan dalam prinsip *money follow with function*. Hal ini merupakan implikasi dari pembagian kewenangan tersebut dan juga adanya upaya untuk memberdayakan masyarakat dengan pemerintah daerah. Berkaitan dengan fenomena bencana banjir yang telah diuraikan uraikan, terdapat hal yang paling mendasar dalam Undang-undang No.24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana belum sepenuhnya menyinggung UU No. 32 tahun 2004 sebagai konsiderannya

Berkaitan dengan pendanaan penanggulangan bencana terdapat adanya pengaturan dana *on call* yang belum diatur oleh perda. Aktivitas penanggulangan bencana yang ditangani BPBD menjadi terhambat, terutama dalam penerimaan penyaluran bantuan dana. Terhambatnya penerimaan dari proses penyaluran dana disebabkan oleh mekanisme pencairan yang lazim, yaitu yang biasanya melalui proses yang dilakukan melalui DPPKAD dengan proses melakukan pengajuan dana kebutuhan terlebih dahulu

Evaluasi implementasi kebijakan dengan kriteria legal berkaitan erat dengan berbagai kepentingan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*interest affected*), dan kepentingan itu akan menyangkut kepentingan instansi maupun pelaksana kebijakan dan dimensi-dimensi sasaran dari kebijakan yang diimplementasikan. Untuk itu, kepentingan

berbagai pihak yang terangkum dalam evaluasi implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh Kriteria legal. Dengan demikian kriteria legal sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan dampak yang ditimbulkannya.

2. *Political acceptability* (Evaluasi Penerimaan Secara Politis)

Proses politik dimaksud, dilakukan oleh aktor-aktor yang secara formal maupun tidak formal langsung terlibat dalam keputusan politik dengan output berwujud kebijakan. Kebijakan yang dilahirkan harus didasarkan pada kepentingan publik, bukan didasarkan pada kepentingan segelintir orang. Keterlibatan tidak hanya dalam proses kebijakan, akan tetapi pelibatan yang dimulai dari input sampai dengan output. Mulai dari perumusan, formulasi, sampai kepada evaluasi. Meninjau kebelakang awal lahirnya peraturan daerah penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung merupakan inisiatif dari pihak eksekutif dalam rangka menjalankan amanat UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, serta menjabarkan undang-undang tersebut di daerah.

Selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang ada rancangan peraturan daerah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bandung. Pada kenyataannya rancangan tersebut tidak lengkap sehingga pihak legislatif menanyakan berulang-ulang kepada pihak eksekutif agar bisa dibahas secepatnya dalam program legislasi daerah (Prolegda).

Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa kejadian bencana khususnya banjir di Kabupaten Bandung masih terkendala oleh dasar hukum pada saat itu. BPBD telah dibentuk secara kelembagaan dan pengaturan tugas, pokok, dan fungsi, namun tidak dilengkapi dengan adanya peraturan daerah mengenai penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung. Dalam pembahasan yang dilaksanakan oleh panitia khusus sering terkendala waktu pembahasan, keadaan ini membawa dampak bagi instansi maupun elemen

masyarakat yang dilibatkan. Dengan kata lain masukan dan saran yang disampaikan belum mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan dan dukungan politik dari berbagai *stakeholder* menjadi sangat penting dalam upaya menjalankan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Persoalan yang kemudian muncul adalah elemen masyarakat yang mana yang kemudian berperan. Semua kebijakan politik, yang berlangsung berkaitan dengan peran legislatif, organisasi, atau komunitas dan harus dukungan dan menetralsir pihak-pihak yang tidak sependapat. Untuk melakukan hal ini secara interpersonal, harus membuat argumen, kerangka kerja dengan fakta. Pada tingkat organisasi dan kelembagaan memobilisasi dukungan dan bernegosiasi dengan kelompok kepentingan maupun alokasi anggaran biaya.

Kecenderungan dalam evaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir membawa perubahan-perubahan bahkan terdapat perbedaan dalam memandang bencana, seperti konteks politik yang semakin mendorong kebijakan manajemen bencana menjadi sebuah tanggung jawab legal. Kebijakan penanggulangan bencana lebih menekankan pada peningkatan ketahanan masyarakat dan mengurangi kerentanan (*vulnerability*), dalam arti, masyarakat yang terkena bencana tidak sepenuhnya mampu mengatasi bencana yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, Fakta dilapangan, diketahui bahwa tanggungjawab legal masih terjadi tumpang tindih kebijakan, yaitu antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah yang tercantum dalam UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) persoalan bencana banjir di Kabupaten Bandung, maka pemerintah membentuk BPBD, akan tetapi pada teknis

dilapangan BPBD tidak sepenuhnya mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah, walaupun ada *Political acceptability* atau penerimaan secara politis, itu disebabkan karena pimpinan BPBD dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Bandung.

Pelibatan banyak pihak dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung mendorong menumbuhkan rasa tanggungjawab karena peran serta partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Upaya bagaimana mengorganisir masyarakat agar dapat berperan dalam proses pembangunan dan memiliki rasa aman seperti yang dikemukakan oleh Handmer dan Dovers, (2007 :13). Di dalam Perda penanggulangan bencana mencantumkan masalah pendanaan dari APBD, yaitu dinas- dinas terkait yang memiliki dana penanggulangan bencana seperti Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan, dan Dinas Sosial diatur melalui perda tersebut dan tetap melalui rekomendasi BPBD kabupaten Bandung dalam mengeluarkan dana tersebut

3. *Robustness under conditions of administrative implementation, and improvability*

Authority atau kewenangan dimaksudkan sebagai hak atau kesempatan Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam mengambil keputusan berkaitan dengan tugas-tugasnya. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki peran dan tanggungjawab memastikan kelancaran program-program penangulangan banjir, karena pemerintah kabupaten, kecamatan maupun perangkat desa merupakan aktor yang paling memahami kondisi wilayah yuridis mereka ketika bencana terjadi. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah dapat bertindak cepat dalam menangani situasi pasca bencana tanpa harus menunggu intruksi dari pemerintah pusat atau provinsi. Dibentuknya BPBD kabupaten Bandung masih relatif muda

sehingga dalam menanggulangi bencana khususnya banjir masih mengalami kendala pembagian kewenangan dan tanggungjawab antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) banyak mekanisme yang belum dituntaskan

Skema finansial yang terjadi di Indonesia sebagian besar bantuan finansial diperoleh dari anggaran pemerintah. Hal ini terjadi karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bab IV Pasca bencana yang menetapkan bahwa dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menggunakan dana APBD Kabupaten/Kota. Apabila dana APBD tidak memadai, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat

Melalui desentralisasi dan otonomi daerah prinsip *subsidiarity* memiliki peranan yang strategis mengingat pelaksanaan sebuah urusan sebaiknya dilaksanakan oleh institusi yang paling bawah atau paling kecil

Institutional commitment merupakan kesiapan memenuhi kebutuhan yang menjadi tugas-tugas BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini diketahui pada kedudukan, fungsi dan tugas pokoknya yang merupakan bagian penting dalam organisasi. Koordinasi dan keterpaduan, nampaknya belum sepenuhnya diwujudkan, terbukti koordinasi antara pihak eksekutif, legislatif dan pelaksana di lapangan (SAR) belum sepenuhnya efektif

Sementara *capability* merupakan kemampuan yang dimiliki oleh staff BPBD kabupaten Bandung dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan lingkungan yang terjadi. Dalam konteks penangulangan bencana banjir di kabupaten Bandung kemampuan organisasi untuk memecahkan masalah, persepsi terhadap

perubahan kebijakan yang ada melalui penggerakan sumber daya yang ada untuk mempengaruhi tujuan yang telah ditetapkan melalui strategi-strategi yang dipilih.

KESIMPULAN

Penelitian secara umum menunjukkan bahwa evaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir yang dilakukan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung lebih menitikberatkan kepada bagaimana pelaksanaan secara teknis penyelamatan, pendistribusian bantuan kepada korban bencana banjir. Peran evaluator, terbatas menjalankan fungsi monitoring dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan serta kegiatan administrasi perkantoran. Hal ini mengindikasikan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh evaluator belum menyentuh sisi legalitas (*legality*) yang membahas mengenai tumpang tindih aturan dalam persepektif otonomi daerah. Dari kriteria penerimaan politis (*political acceptability*) belum dapat melihat bagaimana peran aktor-aktor yang terlibat dalam mengakomodir anggaran penanggulangan bencana banjir. Selanjutnya pada kriteria *robustness under conditions of administrative implementation, and improvability* merupakan penjabaran dari laporan kinerja tanpa mengungkap apakah hasil dan manfaat kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kawasan bencana banjir.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam penanggulangan bencana banjir telah melahirkan rekomendasi kebijakan dalam hal pengaturan masalah keuangan dan tersediannya dana siap pakai yang bisa diakses secara cepat oleh BPBD Kabupaten Bandung setiap kejadian banjir. Namun upaya penyempurnaan kebijakan untuk membuat alternatif solusi belum sampai pada mekanisme untuk melahirkan sebuah rekomendasi untuk perbaikan penanggulangan bencana banjir yang efektif.

Sejalan dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka konsep baru yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ; keberhasilan evaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir harus didukung oleh peran masyarakat, kelembagaan, kapabilitas organisasi agar mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang mencakup akses legal dan penerimaan secara politis.

SARAN

- 1) Saran yang bersifat pengembangan dari aspek keilmuan sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu bahwa secara umum kebijakan penanggulangan bencana banjir di kabupaten Bandung perlu diperkuat dengan mekanisme evaluasi kebijakan dalam ruang lingkup administrasi publik. Kriteria evaluasi dapat dikembangkan sebagai indikator dalam mengevaluasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung.
- 2) Kegiatan evaluasi implementasi kebijakan dapat memberikan solusi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung, melalui informasi yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan dalam membuat perencanaan yang dapat memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat di daerah bencana banjir
- 3) Dalam evaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir diperlukan suatu organisasi yang terdiri dari berbagai kalangan pemikir baik perguruan tinggi maupun instansi *independent* yang bertugas secara khusus dan diberikan kewenangan secara resmi untuk memperbaiki kinerja kebijakan.
- 4) Rekomendasi yang merupakan hasil evaluasi kebijakan secara konsisten dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh kepala daerah dan pelaksana teknis untuk perbaikan kebijakan penanggulangan bencana banjir berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardach, Eugene. 2012. *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. Fourth edition .California : Sage Publications
- Creswell, John. M, 2010. *Research Design ; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Denhardt.Janet V.and Robert B. Denhardt. 2006 *The New PublicService*. New York : M.E.Sharpe
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Edisi ke-2. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Dye, R Thomas. 2002. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Upper Saddle River.
- Goel, S.L, 2006. *Encyclopedia of Disaster Management : Disaster Management Policy and Administration*, Deep and Deep Publication, India Volume 1.
- Hill, Michael and Peter Hupe.,2009., *Implementing Public Policy*., London :SAGE Publications.
- Howlet, Michael and Ramesh, M. 2003, *Studying Public Policy : Policy cycle and Policy Subsystem*. Canada :Oxford University Press
- Ibrahim, Amin, 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung. RefikaAditama.
- Islamy, M Irvan. 2000. *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones,O, Charles. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Keban, Yermias, T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta : Galva Media
- Maxwell, Joseph A., 1996. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. London: SAGE Publications.
- Mazmanian, Daniel A. and Sabatier, Paul A., 1983. *Implementation and Public Policy*. Dallas: The Scott, Foresman and Company.
- Pramusinto,Agus, 2009. *Pembangunan dan Reformasi di Bidang Penanggulangan Bencana di Era Otonomi Daerah*, Gava Media ; Yogyakarta.
- Pressman, Jeffrey L., and Wildavsky, Aaron. 1984, *Implementation*, New Jersey: Prentice-Hall.
- Quarantelli, E.L. 2005.*What is a Disaster? New Answers to Old Questions* International Research Committee on Disasters.
- Rosenbloom. H David,Kravchuk, Robert.s, Clerkin, Richard. M. 2009. *Public Administration: Understanding Management, Politic, and Law in The Public Sector*.Singapore : McGraw – Hill International Edition.
- Shafritz, Jay M., and Albert C. Hyde, eds., 1992, *Classics of Public Administration*, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- Silalahi, Ulber, 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Sudarmanto,Tjuk. 2004 “ *Rancang Bangun Model EvaluasiKebijakanPublik Dengan Pendekatan Agregasi Kepentingan dan Interaksi Dinamis Stakeholder : Studi Kasus Kebijakan Deregulasi pada Sektor Angkutan Laut 1983-2003*” .Disertasi : PascaSarjanaUniversitas Indonesia.
- Vedung, E. 2005. *Public Policy and Program Evaluation*. 3rd edition. New Brunswick, USA ; Transaction Publishers

Wilfredo F. Arce. 2001. *Systematic Qualitative Data Research; An Introduction for Filipino Practitioners*. Manila: Office of Research and Publications Ateneo de Manila University.

Wollmann, Hellmut, 2003, *Evaluation in Public Sector Reform: Concept And Practice In International Perspective*, Massachusetts: Edward Elgar.

Jurnal :

Buckle, P. 2003 "Some contemporary issues in disaster management," *International Journal of Mass Emergencies and Disasters* 21: 109-122.

Caljouw, Peter J.M., Pratiwo 2005 *Flooding in Jakarta: Towards a blue city with improved water management* Dikases di <http://www.kitlvjournals.nl/index.php/btlv/article/viewFile/3615/4375> 30/01/2012.

Drabek, T.E. 1991 "The evolution of emergency management," *Emergency Management: Principles and Practice for Local Government*. Washington DC: International City Management Association.

Huiterma, D., Rayner, T. Massey, E., Haug, C. Hildingsson. 2011 *The Evaluation of Climate Policy : Theory and Emerging Practice in Europe*. Dikases di <http://www.springer.com> 30/01/2012.

Kreps, G. 1998 "Disaster as systemic event and social catalyst," Pp. 31-55 in Quarantelli, E.L. (ed.). *What is a Disaster? Perspectives on the Question*. London: Routledge.

Dokumen-dokumen

- Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.
- *International Strategy for Disaster Reduction: Terminology on Disaster Risk Reduction* (2010).
- *Asian Disaster Preparedness Center: Disaster Risk Management & Mitigation Management Mitigation*
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana: *Jurnal Penanggulangan Bencana* (2011)